



BUPATI BIMA

PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4258);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bima Nomor 27);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bima Nomor 29);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bima Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Bima.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Desa.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
17. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
20. Hari adalah hari kerja.

BAB II PENGALOKASIAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Daerah mengalokasikan Dana Desa setiap tahun anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan besaran dana desa setiap kabupaten.
- (3) Berdasarkan besaran Dana Desa setiap Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan rincian besaran Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya.

Pasal 3

- (1) Rincian besaran Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi Dasar; dan
 - b. Alokasi Formula.
- (2) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dan ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.
- (3) Besaran Alokasi Formula setiap Desa pada ayat (1) huruf b dihitung dengan bobot sebagai berikut :
 - a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Pasal 4

- (1) Jumlah penduduk, angka kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa.
- (2) Luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c ditunjukkan oleh luas wilayah desa tidak termasuk wilayah hutan tutupan negara.
- (3) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) huruf d ditunjukkan oleh Indeks Kesulitan Geografis Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
- (4) Data jumlah penduduk desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima.
- (5) Data luas wilayah desa dan angka kemiskinan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Pasal 5

- (1) Dana Desa Alokasi Dasar untuk setiap Desa ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 720.442.000,- (tujuh ratus dua puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (2) Dana Desa Alokasi Formula untuk setiap desa dihitung dengan cara yaitu Dana Desa Alokasi Formula untuk setiap Desa = besaran alokasi formula x [(25% x rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa kabupaten) + (35% x rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa kabupaten) + (10% x rasio luas wilayah setiap desa terhadap luas wilayah desa kabupaten) + (30% x rasio jumlah tingkat kesulitan geografis setiap desa terhadap total tingkat kesulitan geografis desa kabupaten).
- (3) Besaran Dana Desa untuk setiap desa yang telah dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada Peraturan Bupati ini.

BAB III MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa untuk setiap desa disalurkan oleh daerah kepada desa dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap setelah Dana Desa dilakukan pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa untuk setiap Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan setelah daerah menerima :
 - a. peraturan Desa tentang APBDesa; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa untuk setiap Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan setelah daerah menerima laporan realisasi penggunaan DD tahap I dari Kepala Desa.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan paling kurang DD telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen).

BAB IV PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan Desa dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa.

- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan DD yang dituangkan dalam RKPDesa.
- (3) Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APBDDesa.
- (5) Jenis kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan Desa dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa akan diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APBDDesa.

BAB V LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati dan ditembuskan kepada Camat.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Format laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada Peraturan Bupati ini

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati :
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD dimaksud; dan
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (4) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan sisa Dana Desa tersebut.
- (5) Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah ditetapkan, sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan peraturan desa tentang Perubahan APBDesa dengan cara menetapkan peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada BPD untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan desa tentang perubahan APBDesa.

BAB VII SANKSI

Pasal 11

- (1) Bupati mengenakan sanksi administratif dengan menunda penyaluran Dana Desa.
- (2) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b;
 - b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (3) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (5) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sampai dengan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Dalam hal sampai dengan akhir bulan Juli sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran DD tahap II.

Pasal 12

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b telah diterima; dan
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang urusan Desa.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di : Bima
pada tanggal : 17 - 2 - 2017



BUPATI BIMA,

Hj. INDAH DRAMAYANTI PUTRI

Diundangkan di : Bima
pada tanggal : 17 - 2 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,



H.M. TAUFIK HAK


BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2017 NOMOR ..382

NO	KECAMATAN / DESA	DANA DESA (DD)						KET.
		ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA				Jumlah DD Per Desa 8 = 3+4+5+6+7	
			Angka Jumlah Penduduk (25%)	Angka Penduduk Miskin (35%)	Angka Luas Wilayah (10%)	Angka Kesulitan Geografis (30%)		
1	2	3	4	5	6	7	9	
I MONTA								
1	Tolotangga	720,442,000.00	26,694,537.07	62,303,110.46	8,602,332.08	24,741,557.27	842,783,536.88	
2	Sondo	720,442,000.00	10,279,515.39	15,821,065.45	9,364,274.70	24,517,901.05	780,424,756.58	
3	Simpasai	720,442,000.00	44,694,282.07	42,802,727.46	16,092,227.96	22,044,743.55	846,075,981.03	
4	Sic	720,442,000.00	37,626,585.59	36,302,599.79	6,110,779.74	22,423,131.76	822,905,096.88	
5	Tangga	720,442,000.00	39,440,119.21	21,830,617.44	3,383,025.20	21,270,339.00	806,366,100.86	
6	Monta	720,442,000.00	26,584,369.14	23,670,276.22	2,861,094.51	38,238,231.24	811,795,971.10	
7	Sakuru	720,442,000.00	33,635,116.71	31,151,555.23	6,430,795.64	27,389,153.54	819,048,621.12	
8	Baralau	720,442,000.00	19,914,972.10	21,462,685.69	1,093,387.65	30,109,775.15	793,022,820.59	
9	Tolouwi	720,442,000.00	24,703,039.86	65,001,276.66	4,444,030.28	37,521,213.33	852,111,560.13	
10	Wilamaci	720,442,000.00	17,635,343.38	30,293,047.80	940,999.13	29,589,120.55	798,900,510.85	
11	Pela	720,442,000.00	19,152,271.04	26,368,442.42	9,101,404.50	29,621,306.26	804,685,424.22	
12	Tangga Baru	720,442,000.00	16,838,744.49	36,425,243.71	5,710,759.87	42,373,418.12	821,790,196.21	
13	Nontotera	720,442,000.00	7,864,295.37	106,454,921.02	3,971,625.86	31,726,727.32	870,459,569.57	
14	Waru	720,442,000.00	10,211,719.74	39,368,697.75	8,571,854.38	36,146,957.51	814,741,229.38	
		10,086,188,000.00	335,274,911.15	559,256,267.09	86,678,591.49	417,713,605.66	11,485,111,375.39	
II BOLO								
1	Tambe	720,442,000.00	54,550,074.64	91,615,006.91	5,447,889.67	24,366,460.91	896,421,432.13	
2	Rasabou	720,442,000.00	41,651,952.29	27,349,593.76	4,533,558.54	28,978,331.59	822,955,436.18	
3	Rato	720,442,000.00	54,346,687.69	28,085,457.27	4,819,287.02	13,157,088.18	820,850,520.17	
4	Kananga	720,442,000.00	35,296,110.13	24,528,783.64	3,733,518.80	20,804,787.96	804,805,200.53	
5	Leu	720,442,000.00	32,669,028.70	49,793,430.80	2,318,210.40	28,709,889.90	833,932,559.79	
6	Timu	720,442,000.00	30,389,399.98	38,878,122.08	3,533,508.86	29,912,003.36	823,155,034.28	
7	Bontokape	720,442,000.00	25,084,390.39	63,161,617.88	3,824,475.70	27,252,493.67	839,764,977.64	
8	Sondosia	720,442,000.00	26,414,880.02	26,000,510.66	4,419,267.15	16,365,617.40	793,642,275.22	
9	Nggembe	720,442,000.00	28,982,640.25	29,434,540.37	5,419,316.82	18,392,575.89	802,671,073.33	
10	Sanolo	720,442,000.00	30,372,451.07	44,029,166.64	2,803,948.81	23,536,022.70	821,183,589.22	
11	Tumpu	720,442,000.00	22,559,002.44	18,519,231.65	3,419,217.47	30,781,534.81	795,720,986.37	
12	Rada	720,442,000.00	24,516,601.82	24,406,139.73	4,685,947.06	23,831,713.76	797,882,402.38	
13	Kura	720,442,000.00	5,550,768.82	29,925,116.05	2,142,963.60	26,988,808.49	785,049,656.95	
14	Darussalam	720,442,000.00	20,406,490.56	57,519,997.65	1,747,229.65	19,687,066.03	819,802,783.89	
		10,086,188,000.00	432,790,478.79	553,246,715.10	52,848,339.54	332,764,394.66	11,457,837,928.08	
III WOHA								
1	Keli	720,442,000.00	33,863,927.03	46,482,045.01	13,311,137.42	26,263,988.09	840,363,097.54	
2	Tenga	720,442,000.00	12,915,071.27	9,198,293.87	2,533,459.18	27,491,197.80	772,580,022.12	
3	Tente	720,442,000.00	30,880,918.44	19,009,807.32	571,456.96	11,529,546.06	782,433,728.78	
4	Rabakodo	720,442,000.00	34,440,190.05	26,368,442.42	1,295,302.44	24,588,887.78	807,134,822.69	
5	Samili	720,442,000.00	51,719,606.27	41,698,932.20	2,552,507.75	24,309,469.06	840,722,515.28	
6	Kalampa	720,442,000.00	36,584,227.47	24,528,783.64	1,375,306.41	24,799,414.57	807,729,732.10	
7	Risa	720,442,000.00	45,728,165.72	67,331,511.10	2,362,022.10	28,184,415.55	864,048,114.47	
8	Pandai	720,442,000.00	20,465,811.75	29,802,472.13	12,450,142.27	22,827,712.79	805,988,138.94	
9	Donggobolo	720,442,000.00	17,830,255.87	11,405,884.39	4,933,578.41	25,969,202.53	780,580,921.20	
10	Dadibou	720,442,000.00	22,025,111.70	17,292,792.47	5,990,773.78	19,090,812.18	784,841,490.13	
11	Talabiu	720,442,000.00	46,490,866.78	28,698,676.86	2,485,837.77	24,342,304.58	822,459,686.00	
12	Naru	720,442,000.00	35,194,416.65	29,066,608.62	1,190,535.33	26,873,865.21	812,767,425.81	
13	Nisa	720,442,000.00	29,363,990.78	20,481,534.34	190,485.65	22,124,594.93	792,602,605.71	
14	Waduwani	720,442,000.00	7,262,608.97	6,377,483.75	1,666,749.46	32,857,488.77	768,606,330.95	
15	Penapali	720,442,000.00	10,737,136.02	19,255,095.16	3,390,644.62	24,931,399.41	778,756,275.22	
		10,806,630,000.00	435,502,304.78	396,998,363.28	56,299,939.57	366,184,299.31	12,061,614,906.94	
IV BELO								
1	Ncera	720,442,000.00	21,211,563.90	38,632,834.24	986,715.68	26,274,440.35	807,547,554.17	
2	Lido	720,442,000.00	17,559,073.27	13,000,255.33	4,228,781.49	26,073,099.24	781,303,209.34	
3	Ngali	720,442,000.00	53,914,490.43	16,066,353.29	2,586,795.17	22,441,257.25	815,450,896.13	
4	Renda	720,442,000.00	43,634,975.04	26,736,374.17	6,200,308.00	26,307,391.07	823,321,048.29	
5	Cenggu	720,442,000.00	28,516,545.16	12,264,391.82	6,924,153.48	24,186,866.60	792,333,957.06	
6	Runggu	720,442,000.00	20,279,373.72	10,915,308.72	5,609,802.48	26,640,652.39	783,887,137.31	
7	Soki	720,442,000.00	14,567,590.23	21,830,617.44	556,218.11	29,247,996.32	786,644,422.10	
8	Roka	720,442,000.00	16,135,364.63	15,943,709.37	1,447,690.96	24,498,142.98	778,466,907.94	
9	Diha	720,442,000.00	13,355,742.99	40,595,136.93	620,983.23	27,337,893.27	802,351,756.42	
		6,483,978,000.00	229,174,719.36	195,984,981.32	29,161,448.60	233,007,739.47	7,171,306,888.75	

NO	KECAMATAN / DESA	DANA DESA (DD)						KET.
		ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA				Jumlah DD Per Desa	
			Angka Jumlah Penduduk (25%)	Angka Penduduk Miskin (35%)	Angka Luas Wilayah (10%)	Angka Kesulitan Geografis (30%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3+4+5+6+7	9
V	WAWO							
1	Tarlawi	720,442,000.00	11,898,136.52	16,188,997.21	11,173,888.40	27,671,181.28	787,374,203.41	
2	Ntori	720,442,000.00	18,177,708.58	15,821,065.45	4,666,898.50	31,792,811.42	790,900,483.94	
3	Maria	720,442,000.00	26,355,558.82	27,349,593.76	6,358,411.09	24,814,291.08	805,319,854.76	
4	Pesa	720,442,000.00	17,025,182.53	16,188,997.21	3,440,170.89	22,186,982.55	779,283,333.18	
5	Raba	720,442,000.00	22,508,155.70	27,594,881.60	7,600,377.55	28,372,646.19	806,518,061.04	
6	Kambilo	720,442,000.00	20,525,132.95	23,057,056.63	2,457,264.92	29,112,615.67	795,594,070.16	
7	Maria Utara	720,442,000.00	20,398,016.10	19,255,095.16	3,962,101.58	27,664,074.25	791,721,287.09	
8	Kombo	720,442,000.00	17,652,292.29	27,594,881.60	3,950,672.44	23,309,200.39	792,949,046.72	
9	Riamau	720,442,000.00	6,432,112.27	16,188,997.21	6,788,908.67	32,403,844.13	782,255,862.27	
		6,483,978,000.00	160,972,295.76	189,239,565.82	50,398,694.04	747,327,646.96	7,131,916,202.59	
VI	SAPE							
1	Sari	720,442,000.00	35,372,380.23	36,057,311.96	18,728,549.39	23,198,496.60	833,798,738.18	
2	Boke	720,442,000.00	11,660,851.75	12,264,391.82	12,316,802.32	27,993,322.98	784,677,368.87	
3	Jia	720,442,000.00	26,431,828.93	27,840,169.44	4,731,663.62	22,677,466.87	802,123,128.85	
4	Bugis	720,442,000.00	74,668,433.69	62,548,398.29	3,047,770.45	27,304,572.33	888,011,174.76	
5	Naru	720,442,000.00	34,118,160.71	32,868,570.08	1,676,273.75	19,132,448.42	808,237,452.96	
6	Rasabou	720,442,000.00	30,431,772.26	30,170,403.88	397,162.59	24,993,562.24	806,434,900.97	
7	Sangia	720,442,000.00	46,778,998.29	64,265,413.15	1,211,488.75	31,664,697.27	864,362,597.46	
8	Nac	720,442,000.00	16,643,832.00	14,226,694.51	16,372,241.87	29,239,131.67	796,923,900.05	
9	Rai Oi	720,442,000.00	30,423,297.80	38,510,190.32	1,188,630.47	30,738,549.80	821,302,668.40	
10	Parangina	720,442,000.00	47,584,071.64	51,510,445.65	4,975,485.25	26,524,706.67	851,036,709.21	
11	Kowo	720,442,000.00	35,101,197.63	51,265,157.82	3,562,081.71	24,291,705.35	834,662,142.51	
12	Buncu	720,442,000.00	30,287,706.50	47,953,772.02	5,626,946.19	30,631,205.30	834,941,630.71	
13	Poja	720,442,000.00	18,652,278.12	43,048,015.30	23,311,634.20	26,296,683.11	831,750,610.73	
14	Bajo Pulo	720,442,000.00	14,669,283.70	29,802,472.13	1,093,387.65	35,054,261.58	801,061,405.06	
15	Naru Barat	720,442,000.00	36,609,650.84	37,529,038.98	2,047,720.77	22,871,513.38	819,499,923.96	
16	Tanah Putih	720,442,000.00	11,771,019.68	13,490,831.00	1,001,954.53	29,009,360.32	775,715,165.54	
17	Lamerc	720,442,000.00	19,643,789.50	26,491,086.34	1,081,958.51	27,872,273.71	795,531,108.06	
18	Oi Maci	720,442,000.00	14,593,013.60	27,226,949.85	460,022.85	22,892,913.16	785,614,899.45	
		12,967,956,000.00	535,441,566.90	647,069,312.54	102,831,774.86	482,386,870.76	14,735,685,525.05	
VII	WERA							
1	Ntoke	720,442,000.00	18,999,730.83	32,010,062.66	21,959,186.07	27,854,122.92	821,265,102.47	
2	Pai	720,442,000.00	23,084,418.72	66,350,359.76	17,204,378.44	24,311,192.26	851,392,349.18	
3	Nunngi	720,442,000.00	27,375,880.52	40,104,561.26	1,790,565.14	25,332,032.48	815,245,039.40	
4	Tawah	720,442,000.00	45,617,997.79	32,868,570.08	47,097,577.68	20,966,953.63	866,993,099.19	
5	Hidirasa	720,442,000.00	18,169,234.12	28,085,457.27	4,762,141.32	41,230,476.10	812,689,308.82	
6	Wora	720,442,000.00	32,575,809.68	34,217,653.18	12,728,251.33	25,434,132.24	825,397,846.43	
7	Sungiang	720,442,000.00	38,829,958.37	34,462,941.02	37,665,680.58	27,482,961.17	858,883,541.14	
8	Bala	720,442,000.00	15,296,393.46	29,925,116.05	14,758,828.39	34,022,074.12	814,444,412.02	
9	Oi Tui	720,442,000.00	10,550,697.98	25,142,003.24	23,563,075.26	32,683,949.18	812,381,725.66	
10	Tadewa	720,442,000.00	7,881,244.28	10,792,664.80	3,847,810.19	31,816,055.92	774,779,775.19	
11	Nanga Wera	720,442,000.00	18,584,482.47	19,623,026.92	4,244,020.35	28,428,008.27	791,321,538.01	
12	Ranggasolo	720,442,000.00	9,186,310.53	28,085,457.27	190,485.65	38,873,356.35	796,777,609.81	
13	Kalajena	720,442,000.00	9,516,814.33	99,709,505.51	4,381,170.02	27,680,437.21	861,729,927.07	
14	Mandala	720,442,000.00	6,576,178.02	50,774,582.14	4,304,975.76	38,021,245.81	820,118,981.73	
		10,086,188,000.00	282,445,151.12	532,151,961.16	198,498,146.16	424,136,997.68	11,523,420,256.12	
VIII	DONGGO							
1	Doridungga	720,442,000.00	26,770,807.18	35,812,024.12	1,893,427.39	23,324,337.52	808,242,596.20	
2	Kala	720,442,000.00	13,059,137.02	13,122,899.25	2,956,813.55	34,265,206.02	783,846,055.84	
3	O'o	720,442,000.00	17,737,036.85	25,264,647.15	4,150,206.16	21,565,846.71	789,159,736.88	
4	Mbawa	720,442,000.00	43,372,266.90	58,501,148.99	8,073,734.40	21,858,868.34	852,248,018.62	
5	Palama	720,442,000.00	11,025,267.53	12,141,747.90	4,613,562.51	37,979,889.16	786,202,467.11	
6	Rora	720,442,000.00	16,508,240.70	32,868,570.08	5,598,516.20	16,904,753.66	792,322,080.65	
7	Mpili	720,442,000.00	16,830,270.04	21,094,753.93	4,724,044.19	30,552,655.62	793,643,723.79	
8	Bumi Pajo	720,442,000.00	17,889,577.07	27,226,949.85	8,103,259.67	19,497,662.94	793,159,449.52	
9	Ndano NaE	720,442,000.00	6,457,535.63	59,237,012.50	3,005,244.52	37,429,352.28	826,571,144.94	
		6,483,978,000.00	169,650,138.92	285,269,753.78	43,118,808.60	243,378,572.24	7,225,395,273.55	
IX	SANGGAR							
1	Piong	720,442,000.00	18,211,606.40	19,868,314.75	86,130,945.24	26,802,810.34	871,455,676.73	
2	Boro	720,442,000.00	20,804,790.00	30,047,759.96	8,837,105.65	25,569,904.18	805,701,559.80	
3	Kore	720,442,000.00	37,431,673.09	37,529,038.98	6,213,642.00	21,134,749.01	822,751,103.08	
4	Taloko	720,442,000.00	20,008,191.12	38,510,190.32	9,393,799.97	25,167,680.68	813,521,862.09	
5	Oi Saro	720,442,000.00	8,304,967.09	14,962,558.02	46,378,970.55	25,173,185.35	815,261,681.01	
6	Sandue	720,442,000.00	13,881,159.28	21,585,329.61	2,685,847.71	26,082,145.83	784,676,482.42	
		4,322,652,000.00	118,642,386.98	162,503,191.64	159,640,311.12	149,930,475.39	4,913,368,365.13	

NO	KECAMATAN / DESA	DANA DESA (DD)					Jumlah DD Per Desa	KET.
		ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA			8 = 3+4+5+6+7		
			Angka Jumlah Penduduk (25%)	Angka Penduduk Miskin (35%)	Angka Luas Wilayah (10%)			
1	2	3	4	5	6	7	9	
X	AMBALAWI							
1	Nipa	720,442,000.00	53,355,176.32	65,491,852.33	7,131,782.84	22,461,894.84	868,882,706.33	
2	Tolowata	720,442,000.00	29,202,976.11	39,123,409.91	7,116,543.99	24,515,240.74	820,400,170.75	
3	Rite	720,442,000.00	36,397,789.43	54,453,899.69	12,179,652.65	21,589,151.63	845,062,493.40	
4	Mawu	720,442,000.00	27,169,106.62	41,085,712.60	24,237,394.47	24,371,657.88	837,305,871.58	
5	Talapiti	720,442,000.00	19,779,380.80	46,359,401.09	12,507,287.97	30,690,311.62	829,778,381.48	
6	Kole	720,442,000.00	17,804,832.50	30,415,691.72	5,649,804.46	28,971,931.96	803,284,260.65	
		4,322,652,000.00	183,709,261.78	276,929,967.34	68,822,466.39	152,600,188.67	5,004,713,884.19	
XI	LANGGUDU							
1	Waworada	720,442,000.00	20,109,884.59	33,849,721.43	4,312,595.18	23,018,676.10	801,732,877.30	
2	Karumbu	720,442,000.00	43,194,303.32	34,953,516.69	3,851,619.90	22,563,870.96	825,005,310.87	
3	Rupe	720,442,000.00	31,236,845.60	42,925,371.38	1,281,968.44	30,011,324.10	825,897,509.52	
4	Kalodu	720,442,000.00	6,627,024.76	17,906,012.06	14,149,274.30	27,619,754.52	786,744,065.64	
5	Kawuwu	720,442,000.00	7,593,112.77	12,019,103.99	5,905,055.24	24,096,288.99	770,055,560.98	
6	Doro O'o	720,442,000.00	21,525,118.78	35,812,024.12	5,680,282.17	23,022,119.67	806,481,544.74	
7	Laju	720,442,000.00	35,652,037.29	60,340,807.76	19,021,897.30	22,658,922.69	858,115,665.04	
8	Kangga	720,442,000.00	13,101,509.31	31,151,555.23	3,428,741.75	27,542,228.36	795,666,034.65	
9	Karampi	720,442,000.00	25,660,653.41	58,746,436.83	3,885,907.32	26,343,851.41	835,078,848.97	
10	Waduruka	720,442,000.00	15,042,159.78	47,831,128.11	2,757,279.83	35,742,736.15	821,815,303.86	
11	Dumu	720,442,000.00	18,186,183.03	43,048,015.30	3,276,353.23	28,997,042.26	813,949,593.82	
12	Rompo	720,442,000.00	18,787,869.42	24,406,139.73	4,609,752.80	28,227,752.50	796,473,514.45	
13	Sarac Ruma	720,442,000.00	4,525,359.62	108,294,579.79	3,465,410.24	28,437,739.78	865,165,089.43	
14	Pusu	720,442,000.00	4,406,717.23	81,803,493.45	2,995,386.89	37,316,055.62	846,963,653.20	
15	Sambanc	720,442,000.00	5,542,294.36	47,463,196.35	10,476,710.91	33,125,265.21	817,049,466.84	
		10,806,630,000.00	271,191,073.27	680,551,102.21	89,098,235.50	418,723,628.33	12,266,194,039.31	
XII	LAMBU							
1	Kaleo	720,442,000.00	30,160,589.66	34,830,872.77	965,286.05	23,918,384.86	810,317,133.34	
2	Simpasai	720,442,000.00	30,719,903.77	57,765,285.48	2,238,873.12	30,589,016.20	841,755,078.58	
3	Mangge	720,442,000.00	14,025,225.03	28,698,676.86	17,204,664.17	41,022,314.57	821,392,880.64	
4	Lanta	720,442,000.00	29,787,713.59	32,255,350.49	4,259,259.20	35,070,182.68	821,814,505.96	
5	Nggelu	720,442,000.00	13,423,538.64	32,010,062.66	36,485,621.96	46,381,447.23	848,742,670.48	
6	Rato	720,442,000.00	37,652,008.95	34,708,228.86	8,411,846.43	24,549,580.98	825,763,665.22	
7	Sumi	720,442,000.00	39,999,433.32	46,114,113.25	28,953,819.24	28,189,306.24	863,698,672.06	
8	Soro	720,442,000.00	43,473,960.37	65,491,852.33	2,251,540.42	32,664,026.02	864,323,371.14	
9	Lambu	720,442,000.00	19,076,000.94	38,264,902.49	16,344,145.23	39,657,637.83	833,784,686.48	
10	Hidirasa	720,442,000.00	8,982,923.59	14,349,338.43	14,667,395.27	45,781,222.23	804,222,879.52	
11	Lanta Barat	720,442,000.00	21,897,994.85	27,962,813.35	8,811,866.30	25,637,093.98	804,751,768.49	
12	Melayu	720,442,000.00	23,643,732.83	21,830,617.44	5,914,579.52	28,276,045.48	800,106,975.28	
13	Sangga	720,442,000.00	16,601,459.72	60,463,451.68	6,139,828.81	29,757,945.06	833,404,685.28	
14	Monta Baru	720,442,000.00	22,313,243.21	23,915,564.05	477,452.29	30,208,179.84	797,356,439.39	
		10,086,188,000.00	351,757,728.48	518,661,130.16	153,126,178.01	461,702,383.22	11,571,435,419.87	
XIII	MADAPANGGA							
1	Woro	720,442,000.00	37,465,570.92	32,132,706.57	30,291,504.74	26,219,336.08	846,551,118.31	
2	Campa	720,442,000.00	27,499,610.41	29,434,540.37	26,087,962.59	28,231,666.74	831,695,780.12	
3	Mpuri	720,442,000.00	17,889,577.07	17,292,792.47	4,842,145.30	28,125,853.65	788,592,368.48	
4	Ndano	720,442,000.00	13,550,655.48	15,821,065.45	3,181,110.40	19,962,884.51	772,957,715.85	
5	Monggo	720,442,000.00	42,897,697.35	47,953,772.02	6,686,046.42	26,889,504.62	844,869,020.41	
6	Dena	720,442,000.00	38,668,943.70	27,472,237.68	3,554,462.28	19,757,010.98	809,894,654.64	
7	Rade	720,442,000.00	28,169,092.45	40,349,849.09	2,400,119.23	26,018,788.08	817,379,848.85	
8	Tonda	720,442,000.00	21,516,644.32	32,991,214.00	3,463,029.17	21,636,848.20	800,049,735.69	
9	Bolo	720,442,000.00	31,863,955.36	25,142,003.24	5,143,112.63	21,130,362.70	803,721,433.92	
10	Mada Wau	720,442,000.00	6,381,265.53	9,934,157.38	2,122,010.17	22,098,513.80	760,977,946.88	
11	Ncandi	720,442,000.00	7,330,404.62	34,708,228.86	4,457,364.28	32,737,500.25	799,675,498.01	
		7,924,862,000.00	273,233,417.21	313,232,567.14	92,228,867.20	272,808,269.61	8,876,365,121.17	
XIV	TAMBORA							
1	Labuan Kananga	720,442,000.00	17,381,109.69	25,509,934.99	5,745,047.29	30,641,076.61	799,719,168.58	
2	Kawinda Nac	720,442,000.00	11,635,428.38	25,387,291.07	48,387,165.55	30,813,594.79	836,665,479.79	
3	Kawinda Toi	720,442,000.00	17,372,635.24	15,330,489.78	126,722,485.44	27,723,503.71	907,591,114.17	
4	Oi Panihi	720,442,000.00	9,949,011.59	18,028,655.98	601,934.66	26,707,833.77	775,729,436.00	
5	Oi Bura	720,442,000.00	10,076,128.44	17,170,148.55	7,093,685.71	39,447,139.14	794,229,161.84	
6	Oi Katupa	720,442,000.00	6,093,134.02	32,500,638.33	47,621,413.22	47,740,039.76	854,397,225.32	
7	Rasabou	720,442,000.00	3,754,184.10	12,632,323.58	3,009,673.32	28,525,464.61	768,363,645.60	
		5,043,094,000.00	76,261,631.46	146,559,482.27	239,181,405.20	231,598,652.38	5,736,695,174.31	

NO	KECAMATAN / DESA	DANA DESA (DD)						KET.
		ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA				Jumlah DD Per Desa	
			Angka Jumlah Penduduk (25%)	Angka Penduduk Miskin (35%)	Angka Luas Wilayah (10%)	Angka Kesulitan Geografis (30%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3+4+5+6+7	9
XV	SOROMANDI							
1	Bajo	720,442,000.00	27,550,457.15	36,302,599.79	16,000,794.84	21,592,960.50	821,888,812.28	
2	Punti	720,442,000.00	23,626,783.92	28,208,101.19	5,585,039.34	31,935,013.19	809,796,937.65	
3	Wadu Kopa	720,442,000.00	11,355,771.33	18,764,519.49	6,266,977.98	32,529,714.55	789,358,983.34	
4	Kananta	720,442,000.00	17,745,511.31	35,321,448.45	21,940,137.50	35,946,120.08	831,395,217.34	
5	Sai	720,442,000.00	33,211,393.90	39,981,917.34	22,702,080.11	30,997,625.28	847,335,016.63	
6	Sampungu	720,442,000.00	29,982,626.08	41,576,288.28	66,336,723.86	33,033,298.79	891,370,937.01	
7	Lewintana	720,442,000.00	9,042,244.78	30,170,403.88	7,476,561.88	27,503,284.74	794,634,495.28	
		5,043,094,000.00	152,514,788.46	230,325,278.42	146,308,315.52	213,538,017.14	5,785,780,399.54	
XVI	PARADO							
1	Parado Wanc	720,442,000.00	33,982,569.41	41,331,000.44	33,125,455.04	32,559,827.94	861,440,852.83	
2	Parado Rato	720,442,000.00	31,058,882.02	44,274,454.48	1,859,139.97	27,133,801.23	824,768,277.70	
3	Kuta	720,442,000.00	12,415,078.35	16,311,641.12	22,412,541.92	33,666,537.73	805,247,799.13	
4	Kanca	720,442,000.00	10,821,880.58	12,141,747.90	19,418,107.46	37,547,783.39	800,371,519.33	
5	Lerc	720,442,000.00	8,152,426.88	19,377,739.08	22,728,748.10	40,097,037.49	810,797,951.55	
		3,602,210,000.00	96,430,837.25	133,436,583.03	99,543,992.49	171,004,987.78	4,102,626,400.54	
XVII	LAMBITU							
1	Kaboro	720,442,000.00	6,711,769.32	6,990,703.34	9,029,019.95	22,668,972.43	765,842,465.04	
2	Kuta	720,442,000.00	8,991,398.04	11,160,596.56	4,194,494.08	18,730,661.87	763,519,150.55	
3	Sambori	720,442,000.00	15,940,452.14	21,830,617.44	10,040,784.49	22,539,980.87	790,793,834.95	
4	Teta	720,442,000.00	9,618,507.80	11,405,884.39	2,666,418.17	24,138,191.47	768,271,001.84	
5	Kaowa	720,442,000.00	6,771,090.51	6,622,771.58	2,133,439.31	29,513,939.28	765,483,240.69	
6	Londu	720,442,000.00	5,118,571.55	8,217,142.52	1,347,114.54	26,592,361.52	761,717,190.13	
		4,322,652,000.00	53,151,789.37	66,227,715.84	29,411,270.54	144,184,107.44	4,615,626,883.19	
XVIII	PALIBELO							
1	Panda	720,442,000.00	36,652,023.12	26,859,018.09	7,390,843.33	19,249,416.26	810,593,300.80	
2	Belo	720,442,000.00	23,914,915.43	26,368,442.42	4,780,427.95	14,060,182.92	789,565,968.72	
3	Tonggondoa	720,442,000.00	11,728,647.40	8,094,498.60	847,661.16	32,390,749.83	773,503,556.98	
4	Tonggorisa	720,442,000.00	16,296,379.30	28,085,457.27	2,142,392.14	30,460,967.38	797,427,196.09	
5	Teke	720,442,000.00	32,084,291.22	27,104,305.93	8,048,018.83	24,103,587.10	811,782,203.08	
6	Ntonggu	720,442,000.00	47,168,823.28	69,416,457.71	23,134,482.54	32,399,959.39	892,561,722.93	
7	Nata	720,442,000.00	29,389,414.15	30,415,691.72	7,933,727.44	29,250,929.19	817,431,762.50	
8	Dore	720,442,000.00	8,949,025.76	6,132,195.91	1,438,166.68	30,239,306.92	767,200,695.27	
9	Roi	720,442,000.00	20,889,534.56	23,179,700.54	5,066,918.37	25,619,690.64	795,197,844.11	
10	Ragi	720,442,000.00	10,626,968.09	21,217,397.85	1,353,019.59	31,408,678.30	785,048,063.83	
11	Padolo	720,442,000.00	7,618,536.14	12,141,747.90	1,105,578.73	31,882,221.50	773,190,084.27	
12	Brc	720,442,000.00	9,965,960.51	12,141,747.90	4,933,578.41	32,058,273.88	779,541,560.70	
		8,645,304,000.00	255,284,518.96	291,156,661.86	68,174,815.17	333,123,963.31	9,593,043,959.29	
		137,604,422,000.00	4,413,429,000.00	6,178,800,600.00	1,765,371,600.00	5,296,114,800.00	155,258,138,000.00	



 BUPATI BIMA

 HJ. INDAH DHAMAYANTI